

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Era Reformasi yang ditandai dengan tumbangannya pemerintahan orde baru, iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa di Binjai untuk berpartisipasi di bidang politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Pada umumnya mereka yang terlibat sebagai politisi adalah mereka yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, melainkan lebih pada eksistensi, pengabdian dan pelayanan.

Pada pemilu 1999, perilaku etnis Tionghoa Binjai masih terlihat canggung dan malu-malu untuk terjun langsung kedalam politik praktis namun sangat antusias dalam hal pemberian suara. Pada pemilu 2004, perilaku politik etnis Tionghoa mulai menampakkan geliat yang cukup meningkat secara kuantitas. Dalam hal politik praktis, etnis Tionghoa mulai berani untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Pada periode ini satu orang etnis Tionghoa berhasil memenangkan kursi di DPRD kota Binjai yaitu Sukiwi Tjong. Namun dalam hal pemberian suara, etnis Tionghoa cenderung untuk golput. Pada pemilu 2009, perilaku politik etnis Tionghoa lebih meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Peterus S.H, M.Si, berhasil memenangkan satu kursi di DPRD kota Binjai. Pada pemilu 2014, etnis Tionghoa semakin menunjukkan ketertarikannya dalam politik praktis,

Sekitar 10 orang caleg yang berasal dari etnis Tionghoa, walaupun tidak ada satupun yang berhasil memenangkan kursi.

Etnis Tionghoa ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa berpolitik, Etnis Tionghoa ingin membuktikan bahwa mereka mencintai Negara Indonesia. Etnis Tionghoa ingin ikut membela negara. Etnis Tionghoa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berpolitik. Etnis Tionghoa menyadari dengan berpolitik mereka dapat menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab mereka terhadap negara. Hal inilah yang membuat Etnis Tionghoa antusias untuk berpolitik pada era reformasi. Karena mereka warga Negara Indonesia, mereka lahir di Indonesia, mencari makan di Indonesia, teman-teman mereka ada di Indonesia, maka mereka merasa wajib terlibat dalam politik di Indonesia.

bentuk partisipasi politik yang biasa dilakukan oleh etnis Tionghoa di era reformasi adalah bentuk partisipasi konvensional, yaitu yang meliputi, pemberian suara (*voting*); diskusi kelompok; kegiatan kampanye; membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan dan Komunikasi individual dengan pejabat politik/administrative. Etnis Tionghoa di era reformasi ini, jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah terlibat dalam bentuk partisipasi politik non-konvensional.

Etnis Tionghoa memilih golput bukan karena ketidakpedulian mereka atau sikap apatis mereka terhadap perpolitikan Indonesia. Mereka memiliki alasan tersendiri. Apabila pada suatu periode pemilu, tidak ada calon pemimpin yang

layak dipilih berdasarkan pandangan mereka, maka mereka tidak akan menyumbangkan suaranya dan memilih abstain pada periode tersebut.

Etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan pada pemilu memiliki strategi. Etnis Tionghoa cenderung untuk memilih berdasarkan kelayakan calon pemimpin atau wakil rakyat tersebut. Strategi mereka antara lain dengan mencari tahu tentang reputasi, profil, serta riwayat hidup para calon-calon legislatif ataupun calon presiden dan wakilnya dari berita di media masa, baik itu dari televisi, koran, ataupun pemberitaan di internet. Etnis Tionghoa juga melihat visi dan misi juga program kerja dari calon dan partai yang mengusungnya.

5.2. Saran

Partisipasi politik merupakan dasar dalam kehidupan politik bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa, maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil sekalipun karena dengan keikutsertaan dalam partisipasi politik ini masyarakat dapat ikut andil dalam sistem demokrasi di Indonesia Oleh sebab itu, warga etnis Tionghoa khususnya di kota Binjai lebih aktif lagi dalam kegiatan partisipasi politik dalam pemilu. Perlunya keaktifan mereka dalam segala kegiatan politik tentu akan membawa dampak yang positif bagi mereka, salah satunya sebagai pengalaman dalam berorganisasi ataupun lainnya Sebagai warga etnis Tionghoa yang juga diberikan hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya dan juga hak-hak mereka yang telah dilindungi undang-undang seharusnya mereka tidak ada lagi alasan untuk minder ataupun takut dalam terjun ke ranah perpolitikan



THE
Character Building
UNIVERSITY